

Transparansi & Akuntabilitas Laporan Keuangan Perusahaan (Studi Pada Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia)

**Syarif Hidayah Lubis*, Jerry Theonanda, Meidaman Laia, Octaviana, Stella Vallerine, Surya
Dharmawati, Ferry Hartono**
Universitas Universal, Batam, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi prinsip Transparansi dan Akuntabilitas (T&A) pada Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk. Fokus utamanya adalah kasus manipulasi laporan keuangan tahun buku 2018, serta menilai dampak kumulatif penurunan Transparansi dan Akuntabilitas terhadap efektivitas Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dan kepercayaan publik/investor. Transparansi dan Akuntabilitas dianggap krusial untuk meredam konflik kepentingan dalam kerangka Agency Theory. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen, mencakup Laporan Keuangan 2018, laporan restatement, serta sanksi dan publikasi resmi dari regulator (OJK, Kemenkeu, BEI). Analisis data dilakukan dengan analisis isi dan tematik diperkuat oleh triangulasi sumber. Hasil analisis menunjukkan adanya penyimpangan sistematis. Inti manipulasi (*financial shenanigans*) adalah pengakuan pendapatan prematur dari PT Mahata Aero Teknologi, padahal pembayaran belum diterima. Tindakan ini menyebabkan laporan awal mencatat laba bersih, berbanding terbalik dari kerugian besar pada tahun 2017. Penyimpangan ini secara langsung menurunkan transparansi dan menyebabkan lemahnya akuntabilitas manajemen. Konsekuensinya, regulator menjatuhkan denda dan mewajibkan restatement laporan menjadi rugi. Kegagalan Transparansi dan Akuntabilitas ini pada akhirnya mengganggu GCG dan menurunkan kepercayaan investor terhadap perusahaan.

Kata Kunci: Transparansi & Akuntabilitas, Laporan Keuangan, *Financial Shenanigans*

Histori Artikel

Diterima 16 Desember 2025, Direvisi 7 Januari 2026, Disetujui 7 Januari 2026, Dipublikasi 14 Januari 2026.

***Penulis Koresponden:**

hidayahsyarif@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.60036/x6vzej52>

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan dokumen resmi yang menyajikan posisi dan kinerja keuangan entitas, serta menjadi dasar utama pengambilan keputusan ekonomi bagi investor, kreditur, regulator, dan manajemen (Boedihardjo & Ardini, 2024). Bagi perusahaan publik, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor strategis, kualitas pelaporan keuangan memiliki peran krusial dalam menjaga kepercayaan pasar dan legitimasi publik (Angelika, 2024). Dalam konteks ini, transparansi menuntut keterbukaan atas informasi material dan proses pengambilan keputusan, sedangkan akuntabilitas menekankan tanggung jawab manajemen untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan penggunaan sumber daya kepada pemangku kepentingan (Amrullah et al., 2024; Rosidah et al., 2023).

Transparansi dan akuntabilitas juga berfungsi sebagai mekanisme penting dalam pencegahan kecurangan (fraud), terutama untuk menekan asimetri informasi antara manajemen (agent) dan pemilik atau publik (principal) (Agustin et al., 2025). Penerapan standar akuntansi internasional seperti IFRS yang diadopsi ke dalam PSAK bertujuan meningkatkan transparansi, komparabilitas, dan representasi wajar atas posisi keuangan perusahaan (Herdiansen & Puspita, 2024). Ketika informasi keuangan disajikan secara terbuka dan andal, pengawas eksternal memiliki peluang lebih besar untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini, sehingga integritas laporan keuangan menjadi keharusan etis dan profesional (Rosidah et al., 2023; Fauziyah, 2025).

Namun, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam praktik tata kelola perusahaan seringkali menghadapi tantangan serius, sebagaimana tercermin dalam kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. pada laporan keuangan tahun 2018. Perusahaan ini melaporkan laba bersih USD 809 ribu setelah sebelumnya mengalami kerugian besar, yang kemudian memicu perhatian regulator karena dinilai tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya (Boedihardjo & Ardini, 2024; Fauziyah, 2025). Investigasi mengungkapkan bahwa laba tersebut berasal dari pengakuan pendapatan kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi sebesar USD 239,94 juta, meskipun hingga akhir periode tidak terdapat realisasi pembayaran (CNN Indonesia, 2019). Praktik ini melanggar prinsip akuntansi yang berlaku serta merusak integritas dan objektivitas pelaporan keuangan, sehingga berujung pada sanksi terhadap manajemen dan auditor eksternal (Boedihardjo & Ardini, 2024).

Berbeda dengan sebagian besar penelitian sebelumnya yang memposisikan kasus Garuda Indonesia 2018 semata-mata sebagai contoh manipulasi laporan keuangan, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan menganalisis kasus tersebut secara dinamis dan berkelanjutan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji fase krisis integritas akibat manipulasi laporan keuangan, tetapi juga membandingkannya dengan fase pemulihan perusahaan ketika Garuda berada dalam tekanan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi, khususnya selama proses restrukturisasi utang (PKPU) dan penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) (Amrullah et al., 2024). Dengan demikian, fokus penelitian bergeser dari sekadar “apa yang salah” menuju “bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas diuji, dilanggar, dan kemudian dipulihkan”.

Literatur sebelumnya umumnya meneliti transparansi, akuntabilitas, atau fraud secara parsial dan statis, serta didominasi pendekatan kuantitatif yang kurang menangkap dinamika internal perusahaan dan respons regulator (Wahyudi & Dewayanto, 2023; Gulo & Setyawati, 2023). Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan pendekatan kualitatif berbasis analisis isi dan tematik untuk menelusuri rantai kausal antara financial shenanigans, penurunan transparansi, dan melemahnya akuntabilitas manajerial dalam konteks BUMN strategis. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan Agency Theory, Legitimacy Theory, dan prinsip Good Corporate Governance dalam satu kerangka analitis terpadu guna menjelaskan bagaimana tekanan institusional dan kepentingan publik memengaruhi perilaku pelaporan dan tata kelola perusahaan (Jensen & Meckling, 1976).

Dengan pendekatan tersebut, kontribusi utama penelitian ini terletak pada pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pelanggaran dan pemulihan transparansi serta akuntabilitas dalam entitas dengan kepentingan publik tinggi, bukan sekadar pada pengulangan analisis atas skandal yang telah banyak diteliti sebelumnya.

KAJIAN LITERATUR

Laporan keuangan (LK) adalah dokumen resmi yang menyajikan gambaran menyeluruh mengenai posisi dan kinerja keuangan suatu entitas (Chendra et al., 2025). Keandalan laporan keuangan ini menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik dan memenuhi tuntutan transparansi (Boedihardjo & Ardini, 2024). Transparansi didefinisikan sebagai keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai kondisi perusahaan (Amrullah et al., 2024). Transparansi diwujudkan melalui penyediaan akses publik yang lebih luas terhadap informasi keuangan (Khikmah & Purwanto, 2023), dan merupakan prinsip penting untuk operasional bisnis yang objektif dan sehat (Amrullah et al., 2024). Perusahaan publik, seperti PT. Garuda Indonesia, cenderung harus menonjolkan nilai mereka melalui pelaporan yang lebih transparan dan terstandar dibandingkan perusahaan swasta, karena adanya kewajiban regulasi yang ketat (Angelika, 2024). Sementara itu, Akuntabilitas adalah prinsip atau kewajiban untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang dilakukan (Amrullah et al., 2024). Akuntabilitas menuntut pembuatan laporan yang jelas (Rosidah et al., 2023), dan memastikan setiap pegawai atau pihak berkepentingan dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka sesuai garis kewenangan yang ditetapkan oleh Perusahaan (Susilo & Wantono, 2016).

Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berguna bagi para pengguna, khususnya investor dan kreditur, dalam menilai prospek arus kas masuk netto di masa depan serta mengevaluasi bagaimana manajemen menjalankan fungsi penatagunaan (*management's stewardship*) atas sumber daya entitas (Malihah, 2024). Informasi tersebut menjadi dasar bagi pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, seperti keputusan investasi, pembiayaan, dan penilaian risiko. Oleh karena itu, laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan kinerja masa lalu, tetapi juga sebagai sarana komunikasi ekonomi antara entitas dan pemangku kepentingannya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan harus menyajikan informasi yang relevan dan memiliki representasi tepat (*faithful representation*), yaitu mencerminkan kondisi ekonomi entitas secara jujur, lengkap, dan bebas dari kesalahan material (Malihah, 2024). Kualitas informasi ini sangat penting karena setiap distorsi, baik yang disengaja maupun tidak, berpotensi menyesatkan pengguna laporan keuangan dan mengurangi kemampuan mereka dalam menilai kinerja serta posisi keuangan perusahaan secara akurat. Dengan demikian, keandalan laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi, tetapi juga oleh kualitas pertimbangan profesional yang digunakan dalam proses penyusunan laporan.

Keandalan tersebut sangat bergantung pada penerapan etika profesi akuntansi, yang berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi akuntan dan manajemen dalam menjalankan tanggung jawab pelaporan secara objektif, jujur, dan profesional (Sulistiowati et al., 2025). Prinsip etika seperti integritas menekankan pentingnya kejujuran dan kebenaran dalam penyajian informasi keuangan, sedangkan objektivitas menuntut bebas dari bias dan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan akuntansi (Boedihardjo & Ardini, 2024). Ketika prinsip-prinsip etika ini diabaikan, laporan keuangan berisiko mencerminkan kepentingan manajerial jangka pendek, bukan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Kegagalan dalam menjunjung etika profesi dapat tercermin dalam penggunaan kebijakan akuntansi yang agresif atau dalam pelaporan yang dipengaruhi oleh tingkat ketidakpastian pengukuran yang tinggi. Dalam kondisi tersebut, informasi yang disajikan berpotensi tidak

memenuhi kriteria representasi tepat atas aset, liabilitas, pendapatan, atau beban, sehingga kehilangan daya guna bagi pengguna laporan keuangan (Malihah, 2024). Praktik semacam ini tidak hanya menurunkan kualitas informasi, tetapi juga membuka ruang bagi terjadinya manipulasi laporan keuangan dan praktik kecurangan (*fraud*).

Oleh karena itu, penegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat krusial dalam menjaga integritas pelaporan keuangan. Transparansi memastikan bahwa informasi material disampaikan secara terbuka dan dapat diverifikasi, sedangkan akuntabilitas menuntut manajemen untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan kebijakan akuntansi yang diambil (Pratama et al., 2025). Penerapan etika bisnis yang kuat dalam pengambilan keputusan akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pencegahan kecurangan, tetapi juga sebagai fondasi untuk membangun kepercayaan publik, memperkuat tata kelola perusahaan, dan menjaga keberlanjutan entitas dalam jangka panjang.

Kasus PT Garuda Indonesia Tbk. tahun 2018 menjadi contoh kegagalan akut dalam praktik Transparansi dan Akuntabilitas. Skandal ini, yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius atas prinsip dasar etika profesi akuntansi (Pratama et al., 2025), terjadi setelah perusahaan yang berstatus BUMN melaporkan laba bersih USD 809 ribu pada laporan keuangan 2018, berbanding terbalik dari kerugian besar di tahun sebelumnya (Boedihardjo & Ardini, 2024). Inti dari kecurangan tersebut adalah manajemen mengakui sekaligus pendapatan perjanjian kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi (Mahata) sebesar USD 239.94 juta, meskipun pihak Mahata belum melakukan satu pun pembayaran hingga akhir tahun buku 2018 (Pridehan et al., 2024). Perilaku manajerial ini (yaitu pencatatan pendapatan palsu) melanggar integritas dan objektivitas penyajian laporan (Pratama et al., 2025). Skandal ini sangat menyesatkan karena laporan tersebut mengubah kondisi perusahaan dari rugi menjadi untung, membuat dua komisaris Garuda bahkan menolak menandatangani karena laporan tersebut menimbulkan kerancuan dan menyesatkan (CNN Indonesia, 2019).

Pelanggaran tersebut memicu reaksi keras dari regulator: pada Juni 2019, Kementerian Keuangan, OJK, dan BEI kompak menyatakan bersalah dan menjatuhkan sanksi (Pablo, 2019). OJK memberikan sanksi administratif berupa denda kepada Garuda Indonesia sebesar Rp 100 juta (Pridehan et al., 2024), dan sanksi yang sama juga dikenakan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menandatangani Laporan Tahunan. Regulator juga mewajibkan manajemen untuk menyajikan kembali (*restatement*) laporan keuangan per 31 Desember 2018 dan interim Maret 2019 (Pridehan et al., 2024). Setelah disajikan ulang, laporan keuangan Garuda yang semula untung berubah menjadi rugi bersih (sekitar Rp 2,4 triliun) (Pratama et al., 2025). Auditor publik yang terlibat juga dikenakan sanksi karena dinilai gagal mempertahankan independensi (Pratama et al., 2025). Pasca-skandal dan selama proses restrukturisasi utang (PKPU) (Amrullah et al., 2024), PT Garuda Indonesia menunjukkan perbaikan dalam GCG, antara lain dengan menerapkan Transparansi melalui penyediaan informasi keadaan keuangan dan pengelolaan perusahaan secara intensif dan terbuka kepada kreditur (Amrullah et al., 2024), dan mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang dapat diakses publik secara daring (Amrullah et al., 2024). Upaya peningkatan transparansi dan praktik akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan juga mencakup adopsi standar baru seperti IFRS/PSAK 73, yang menyebabkan perubahan signifikan pada liabilitas sewa dan aset perusahaan (Herdiansen & Puspita, 2024).

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis skandal pelaporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (Pratama et al., 2025). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan analisis mendalam terhadap praktik manipulasi laporan keuangan dan pelanggaran prinsip tata kelola perusahaan

dalam konteks BUMN strategis (Pratama et al., 2025). Studi kasus tunggal digunakan karena kasus Garuda Indonesia merupakan peristiwa yang unik, kompleks, dan berdampak signifikan terhadap integritas pelaporan keuangan publik, sehingga memerlukan analisis kontekstual yang mendalam dibandingkan pendekatan multi-kasus (Pratama et al., 2025).

Sumber data utama penelitian ini adalah dokumen primer, meliputi laporan keuangan tahunan dan interim PT Garuda Indonesia periode 2018–2019, catatan atas laporan keuangan, laporan auditor independen, serta dokumen resmi regulator berupa keputusan dan siaran pers Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Keuangan terkait penjatuhan sanksi (Pratama et al., 2025). Data sekunder berupa artikel akademik dan pemberitaan media kredibel digunakan secara terbatas sebagai sumber pendukung untuk memperkaya konteks dan memverifikasi kronologi peristiwa (Pratama et al., 2025). Pemilihan dokumen dilakukan berdasarkan kriteria inklusi, yaitu relevansi langsung dengan isu pengakuan pendapatan, kepatuhan terhadap PSAK, dan praktik tata kelola perusahaan, serta kriteria eksklusi berupa dokumen yang tidak berkaitan langsung dengan peristiwa inti (Pratama et al., 2025).

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (content analysis) terhadap dokumen primer dengan tahapan pengodean, kategorisasi, dan pengembangan tema secara induktif untuk mengidentifikasi pola manipulasi pelaporan dan implikasinya terhadap transparansi dan akuntabilitas (Pratama et al., 2025). Fokus analisis diarahkan pada pola pengakuan pendapatan, konsistensi antara angka keuangan dan narasi manajemen, serta kesesuaian temuan auditor dan regulator dengan kondisi ekonomi yang mendasarinya (Pratama et al., 2025). Dengan demikian, temuan penelitian bersumber dari penelaahan langsung terhadap dokumen asli, bukan semata-mata dari interpretasi penelitian terdahulu.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari laporan keuangan, dokumen regulator, dan laporan auditor untuk memastikan konsistensi informasi (Pratama et al., 2025). Dependability diperkuat melalui pencatatan sistematis seluruh proses analisis (audit trail), sementara confirmability dijaga dengan penelusuran silang lintas dokumen untuk meminimalkan bias peneliti (Pratama et al., 2025). Pendekatan ini dinilai tepat karena mampu menghasilkan analisis berbasis bukti primer yang memberikan pemahaman komprehensif mengenai mekanisme penyimpangan pelaporan keuangan serta dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas (Pratama et al., 2025).

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Studi Literatur dengan pendekatan Analisis Dokumen (Pridehan et al., 2024). Teknik ini dipilih karena penelitian bersifat kualitatif deskriptif dan berfokus pada studi kasus penyimpangan laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2018 (Pridehan et al., 2024). Kasus tersebut telah terdokumentasi secara luas melalui berbagai publikasi resmi, sehingga data sekunder dinilai memadai untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai mekanisme manipulasi dan pelanggaran standar akuntansi yang terjadi (Pridehan et al., 2024).

Sumber data pertama adalah dokumen keuangan perusahaan berupa Laporan Keuangan Tahunan PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2018, termasuk laporan restatement pasca-sanksi (Pratama et al., 2025). Dokumen ini digunakan untuk menganalisis pola pengakuan pendapatan, beban, dan laba, serta mengidentifikasi indikasi terjadinya praktik manipulasi akuntansi (Pratama et al., 2025). Keberadaan laporan restatement juga memungkinkan peneliti membandingkan penyajian laporan sebelum dan sesudah koreksi regulator (Pratama et al., 2025).

Sumber data kedua terdiri dari dokumen regulator, seperti siaran pers, keputusan sanksi, dan instruksi resmi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan Bursa Efek Indonesia (Pablo, 2019). Dokumen-dokumen ini memberikan informasi otoritatif mengenai temuan audit, bentuk pelanggaran, serta tindakan korektif yang diwajibkan kepada

perusahaan (Pratama et al., 2025). Sumber tambahan berasal dari literatur akademik dan ketentuan profesi, termasuk Kode Etik IAI dan SPAP, yang digunakan untuk memperkuat analisis dari perspektif etika dan kepatuhan standar (Pratama et al., 2025).

Selain itu, pemberitaan media daring terpercaya turut digunakan untuk merekonstruksi kronologi kasus dan mengidentifikasi respon publik terhadap penyimpangan yang terjadi. Seluruh data kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis dokumen dengan penerapan Triangulasi Sumber (CNN Indonesia, 2019). Triangulasi dilakukan untuk membandingkan informasi dari berbagai jenis dokumen sehingga validitas dan kredibilitas temuan dapat terjamin, serta menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang dampak kasus terhadap transparansi dan akuntabilitas perusahaan (Fauziyah, 2025).

Metode Analisis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis) untuk menelaah dokumen seperti laporan keuangan, laporan audit, artikel jurnal, dan publikasi media. Pendekatan ini dipilih karena efektif dalam mengidentifikasi pola, makna, serta indikasi penyimpangan baik dalam angka maupun narasi laporan keuangan, dan banyak digunakan dalam riset akuntansi forensik untuk mengungkap manipulasi akuntansi. Analisis tidak hanya berfokus pada data finansial, tetapi juga pada narasi manajemen, auditor, dan media sebagai indikator adanya *financial shenanigans*.

Hasil analisis isi kemudian diperdalam melalui analisis tematik (thematic analysis) dengan proses pengodean, pengelompokan kategori, dan pengembangan tema utama seperti *financial shenanigans*, transparansi, dan akuntabilitas. Teknik ini efektif untuk mengidentifikasi pola laten dalam data kualitatif serta menjelaskan dinamika fraud dan tata kelola perusahaan, khususnya pada kasus skandal laporan keuangan perusahaan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis skandal pelaporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk. tahun 2018 (Pratama et al., 2025). Hasil analisis dokumen menunjukkan adanya penyimpangan laporan keuangan yang sistematis, yang berfokus pada pengakuan pendapatan yang prematur (salah satu indikator *financial shenanigans*) yang dikemukakan oleh (Schilit & Perler, 2010). Hasil analisis menunjukkan adanya penyimpangan signifikan pada laporan keuangan Garuda Indonesia tahun buku 2018. Laporan tersebut secara mengejutkan mencatat laba bersih sebesar USD 809,84 ribu (atau USD 5,018 juta) (Boedihardjo & Ardini, 2024), berbanding terbalik dengan kondisi tahun sebelumnya (2017) yang mencatat kerugian besar sebesar USD 216,58 juta (Boedihardjo & Ardini, 2024). Tabel berikut menyajikan data komparatif yang menjadi inti kontroversi pelaporan keuangan tahun buku 2018:

Tabel 1. Data komparatif

Indikator Keuangan	Laporan Awal Tahun Buku 2018	Laporan Keuangan Restatement 2018	Temuan
Kinerja Laba Bersih	Laba Bersih USD 809,84 ribu (atau US\$5,018 juta) (Boedihardjo & Ardini, 2024)	Rugi Bersih US\$175,028 juta (sekitar Rp2,4 triliun) (Pratama et al., 2025)	Perubahan status dari untung menjadi rugi bersih akibat koreksi regulator
Kinerja Tahun Sebelumnya (2017)	Rugi Besar USD 216,58 juta (Boedihardjo & Ardini, 2024)	Rugi Besar USD 216,58 juta	Menunjukkan tekanan kinerja yang memotivasi manajemen

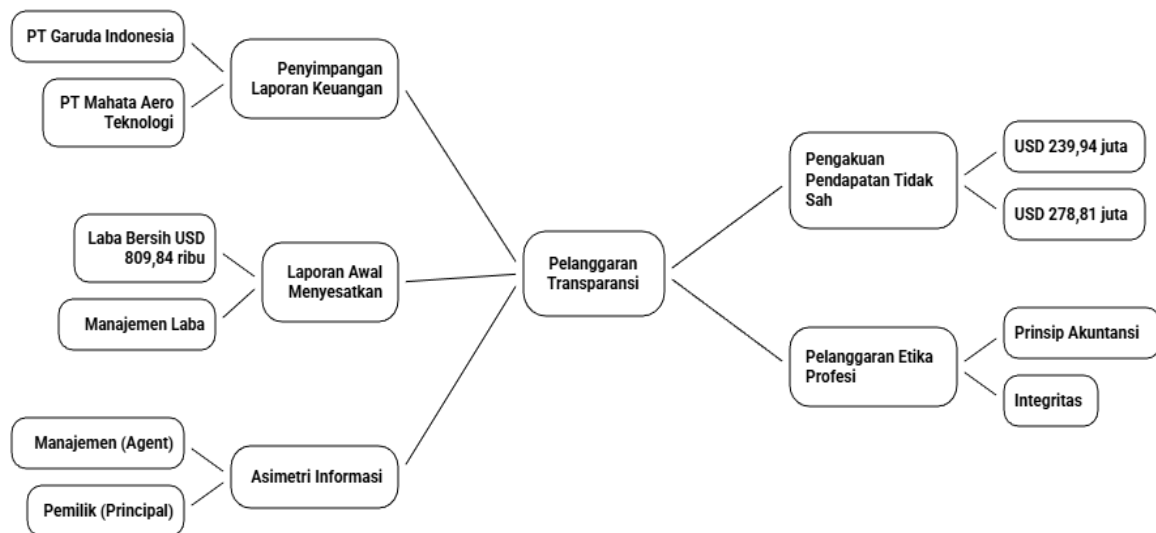
Indikator Keuangan	Laporan Awal Tahun Buku 2018	Laporan Keuangan Restatement 2018	Temuan
			(Boedihardjo & Ardini, 2024)
Penyebab Manipulasi (Pendapatan)	Mencatat Pendapatan sebesar USD 239,94 juta atau USD 278,81 juta (CNN Indonesia, 2019)	Pendapatan tersebut dianulir/dikoreksi	Pengakuan pendapatan prematur dari PT Mahata Aero Teknologi yang belum dibayar (Pridehan et al., 2024)
Konsekuensi Regulasi	Tidak ada	Denda Rp 100 juta dan sanksi denda untuk Direksi/Komisaris (Pridehan et al., 2024); Pembekuan izin KAP (Boedihardjo & Ardini, 2024)	Kegagalan Akuntabilitas dan pelanggaran etika profesional (Pratama et al., 2025)

1. Pelanggaran Transparansi Akibat Penyimpangan Laporan Keuangan

Penyimpangan laporan keuangan pada PT Garuda Indonesia berpengaruh langsung terhadap menurunnya tingkat transparansi informasi keuangan yang disajikan kepada publik (Sulistiowati et al., 2025). Transparansi adalah prinsip fundamental yang menuntut keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi material yang relevan mengenai kondisi perusahaan (Amrullah et al., 2024)

Inti dari pelanggaran ini adalah manajemen mengakui pendapatan sebesar USD 239,94 juta atau USD 278,81 juta dari perjanjian kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi (CNN Indonesia, 2019). Pengakuan pendapatan ini dilakukan sekaligus, meskipun pihak Mahata belum melakukan satu pun pembayaran hingga akhir tahun buku 2018 (Pridehan et al., 2024). Praktik ini, yang merupakan salah satu indikator *financial shenanigans* (Schilit & Perler, 2010), dinilai bertentangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku (PSAK) dan melanggar integritas serta objektivitas penyajian laporan (Fauziyah, 2025).

Laporan awal yang menyesatkan mencatat laba bersih sebesar USD 809,84 ribu, suatu tindakan yang bertujuan meningkatkan penampilan kinerja perusahaan (manajemen laba) dan menyembunyikan kondisi keuangan sesungguhnya (Boedihardjo & Ardini, 2024). Tindakan ini membuat informasi yang tersedia bagi publik menjadi menyesatkan (Gulo & Setyawati, 2023). Pelanggaran tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius atas prinsip dasar etika profesi akuntansi (Pratama et al., 2025), yang menyebabkan pembaca eksternal tidak lagi memperoleh gambaran yang andal mengenai aset, liabilitas, penghasilan, dan beban entitas (Susilo & Wantono, 2016). Akibatnya, fungsi laporan keuangan sebagai alat keterbukaan melemah, yang berkontribusi pada asimetri informasi antara manajemen (*Agent*) dan pemilik (*Principal*) (Agustin et al., 2025).



Gambar 1. Pelanggaran Transparansi Akibat Penyimpangan Laporan Keuangan

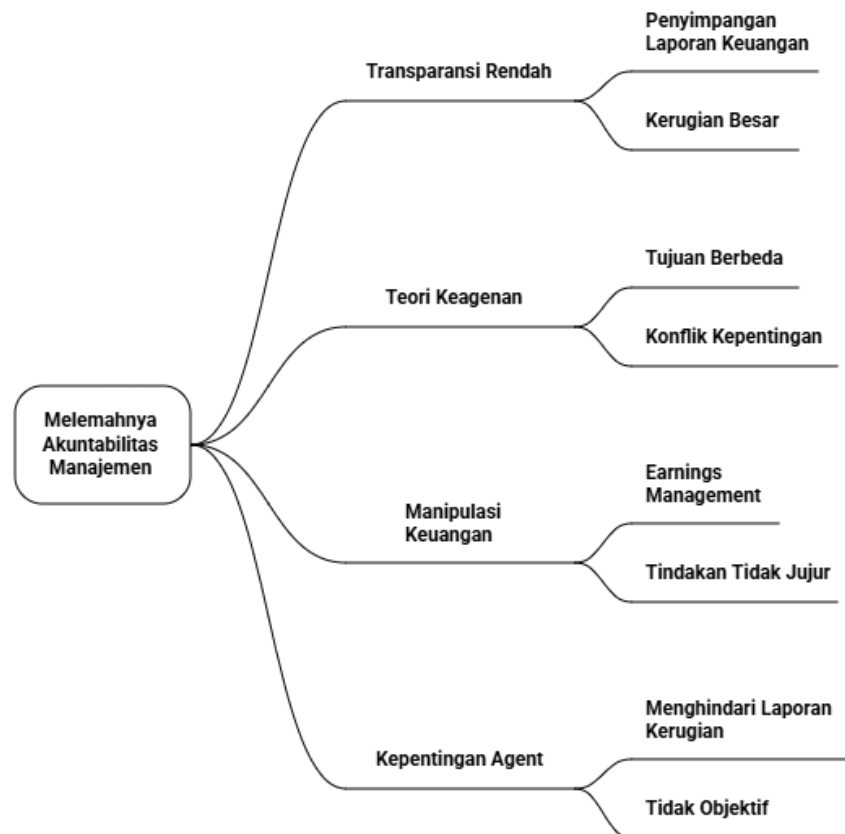
Penyimpangan laporan keuangan pada PT Garuda Indonesia berpengaruh langsung terhadap menurunnya tingkat transparansi informasi keuangan yang disajikan kepada publik (Sulistiowati et al., 2025). Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola perusahaan yang menuntut keterbukaan atas informasi material agar perusahaan tetap memperoleh kepercayaan dan legitimasi dari pemangku kepentingan (Amrullah et al., 2024). Dalam kerangka Legitimacy Theory, transparansi berfungsi sebagai mekanisme utama untuk memastikan bahwa aktivitas dan kinerja perusahaan dipersepsikan selaras dengan nilai, norma, dan ekspektasi publik.

Inti pelanggaran transparansi dalam kasus ini terletak pada pengakuan pendapatan sebesar USD 239,94 juta atau USD 278,81 juta dari perjanjian kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi yang diakui sekaligus, meskipun hingga akhir tahun buku 2018 tidak terdapat realisasi pembayaran (CNN Indonesia, 2019; Pridehan et al., 2024). Praktik ini merupakan salah satu bentuk *financial shenanigans* berupa pengakuan pendapatan prematur (Schilit & Perler, 2010), yang bertentangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku (PSAK) dan melanggar integritas serta objektivitas penyajian laporan keuangan (Fauziah, 2025).

Dari perspektif Legitimacy Theory, manipulasi pelaporan tersebut dapat dipahami sebagai strategi manajemen untuk mempertahankan legitimasi organisasi di tengah tekanan kinerja keuangan dan ekspektasi publik terhadap BUMN strategis. Dengan melaporkan laba bersih sebesar USD 809,84 ribu, manajemen berupaya membangun citra kinerja positif dan menyesuaikan persepsi publik, meskipun kondisi ekonomi perusahaan sesungguhnya menunjukkan kerugian (Boedihardjo & Ardini, 2024; Fauziah, 2025). Namun, upaya legitimasi yang dibangun melalui informasi menyesatkan justru melemahkan fungsi laporan keuangan sebagai sarana keterbukaan, sehingga informasi yang tersedia bagi publik menjadi tidak andal dan menyesatkan (Gulo & Setyawati, 2023).

Pelanggaran ini juga merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip dasar etika profesi akuntansi (Pratama et al., 2025), yang menyebabkan pemangku kepentingan eksternal tidak lagi memperoleh gambaran yang wajar mengenai aset, liabilitas, penghasilan, dan beban entitas (Susilo & Wantono, 2016). Akibatnya, legitimasi perusahaan semakin tergerus dan asimetri informasi antara manajemen (agent) dan pemilik atau publik (principal) semakin meningkat, yang pada akhirnya melemahkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam kerangka Good Corporate Governance (Agustin et al., 2025).

2. Melemahnya Akuntabilitas Manajemen



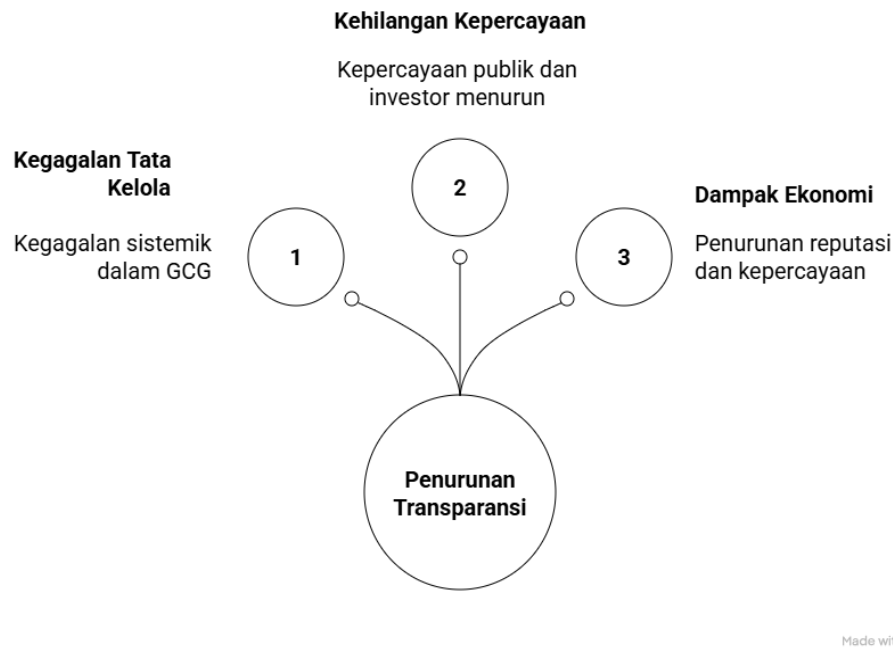
Gambar 2. Melemahnya Akuntabilitas Manajemen

Rendahnya transparansi akibat penyimpangan laporan keuangan menyebabkan melemahnya akuntabilitas manajemen dalam mempertanggungjawabkan kinerja dan keputusan perusahaan (Amrullah et al., 2024; Rosidah et al., 2023). Temuan ini sejalan dengan *Agency Theory*, yang menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara agent (manajemen) dan principal (pemilik/publik), sehingga memicu konflik kepentingan ketika mekanisme pengawasan dan transparansi melemah (Agustin et al., 2025).

Manajemen berada di bawah tekanan setelah mengalami kerugian besar pada tahun 2017, yang mendorong munculnya perilaku oportunistik seperti *earnings management* untuk menghindari pelaporan kinerja negatif (Boedihardjo & Ardini, 2024). Tindakan ini menunjukkan bahwa agent memilih bertindak tidak jujur dan tidak objektif demi melindungi kepentingan pribadi dan reputasi jangka pendek, sehingga kepentingan agent ditempatkan di atas kepentingan principal (Pratama et al., 2025).

Dari perspektif *Legitimacy Theory*, pelemahan akuntabilitas ini mencerminkan upaya manajemen untuk mempertahankan legitimasi organisasi melalui pencitraan kinerja keuangan, alih-alih melalui pertanggungjawaban yang substantif dan transparan. Akuntabilitas yang seharusnya menjadi sarana pembuktian kesesuaian antara tindakan manajemen dan ekspektasi publik justru direduksi menjadi formalitas pelaporan, sehingga legitimasi yang dibangun bersifat simbolik dan rapuh (Amrullah et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa kegagalan akuntabilitas tidak hanya memperparah konflik keagenan, tetapi juga memperdalam krisis legitimasi perusahaan dalam kerangka *Good Corporate Governance*.

3. Dampak Kumulatif pada Tata Kelola Pasca-Krisis dan Kepercayaan Publik



Gambar 3. Dampak Kumulatif Pada Tata Kelola Garuda Indonesia

Dampak kumulatif dari menurunnya transparansi dan akuntabilitas berimplikasi langsung pada terganggunya tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*) serta menurunnya kepercayaan publik dan investor terhadap PT Garuda Indonesia (Fauziyah, 2025). Kasus ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam penerapan GCG dan etika profesional, yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berdimensi sosial karena menyangkut legitimasi perusahaan di mata publik (Fauziyah, 2025; Pratama et al., 2025).

Dalam perspektif *Legitimacy Theory*, kegagalan tata kelola ini menunjukkan terjadinya *legitimacy gap*, yaitu ketidaksesuaian antara ekspektasi publik terhadap perilaku perusahaan dengan praktik aktual yang dijalankan manajemen. Tekanan untuk mempertahankan citra positif (Maulida, 2025), lemahnya pengendalian internal, serta hilangnya independensi auditor eksternal (Boedihardjo & Ardini, 2024) mendorong perusahaan membangun legitimasi secara simbolik melalui pelaporan keuangan, alih-alih melalui kepatuhan substantif terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan etika.

Dampak ekonomi dan pasar dari kegagalan tata kelola tersebut termanifestasi dalam rangkaian efek berlapis, mulai dari pengungkapan praktik manipulatif, sanksi dan intervensi regulator, hingga penurunan reputasi serta kepercayaan publik dan investor (Natalis, 2023). Dalam konteks *Agency Theory*, kegagalan ini mempertegas lemahnya mekanisme pengawasan terhadap perilaku oportunistik manajemen, sementara dalam kerangka GCG, kondisi tersebut mencerminkan tidak efektifnya fungsi pengendalian dan pertanggungjawaban (Pratama et al., 2025). Mengingat PT Garuda Indonesia merupakan BUMN, kegagalan tata kelola dan pengawasan ini berdampak langsung pada aset publik dan keuangan negara, sehingga risiko yang ditimbulkan bersifat sistemik dan berjangka panjang (Resia, 2021).

Di sisi lain, literatur juga mencatat adanya upaya pemulihan legitimasi pasca-skandal, khususnya selama proses restrukturisasi utang (PKPU). PT Garuda Indonesia mulai menunjukkan perbaikan praktik GCG melalui peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi keuangan serta pengelolaan perusahaan secara lebih intensif kepada kreditur (Amrullah et al., 2024). Upaya ini menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pencegahan kecurangan, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam membangun kembali legitimasi, kredibilitas, dan kepercayaan publik pasca-krisis tata kelola.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa skandal pelaporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk. pada tahun 2018 mencerminkan kegagalan mendasar dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar utama Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Praktik *premature revenue recognition* yang merupakan bentuk *financial shenanigans* tidak hanya mendistorsi kinerja keuangan perusahaan, tetapi juga merusak fungsi laporan keuangan sebagai mekanisme keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada publik. Temuan ini menunjukkan bahwa manipulasi pelaporan keuangan berperan sebagai pemicu awal yang menciptakan asimetri informasi, melemahkan akuntabilitas manajerial, dan pada akhirnya memicu kegagalan tata kelola yang bersifat sistemik.

Implikasi Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengintegrasikan Agency Theory, Legitimacy Theory, dan prinsip GCG dalam menjelaskan dinamika penyimpangan pelaporan keuangan pada BUMN strategis. Temuan menunjukkan bahwa manipulasi laporan keuangan tidak hanya merupakan hasil konflik kepentingan antara agent dan principal, tetapi juga merupakan respons manajerial terhadap tekanan legitimasi. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman bahwa kegagalan tata kelola tidak dapat dijelaskan secara parsial, melainkan perlu dipahami sebagai interaksi antara konflik keagenan, upaya mempertahankan legitimasi simbolik, dan lemahnya mekanisme pengendalian dalam kerangka GCG.

Implikasi Praktis dan Manajerial

Dari sisi praktis, hasil penelitian menegaskan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan terhadap praktik pengakuan pendapatan, khususnya pada perusahaan publik dan BUMN dengan tingkat eksposur publik yang tinggi. Regulator perlu meningkatkan penegakan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan independensi auditor, sementara manajemen perusahaan harus menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai strategi keberlanjutan jangka panjang, bukan sekadar alat pencitraan kinerja. Bagi dewan komisaris dan komite audit, temuan ini menekankan urgensi pengawasan yang lebih substansial terhadap kebijakan pelaporan keuangan untuk mencegah terulangnya praktik manipulatif.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan desain studi kasus tunggal, sehingga temuan belum dapat digeneralisasi ke seluruh perusahaan publik atau BUMN. Selain itu, analisis sepenuhnya didasarkan pada dokumen primer dan sekunder yang tersedia untuk publik, tanpa melibatkan wawancara dengan pihak internal perusahaan atau regulator, sehingga perspektif aktor kunci mungkin belum sepenuhnya terungkap.

Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan multi-kasus atau komparatif guna membandingkan dinamika transparansi dan akuntabilitas pada berbagai BUMN atau sektor strategis lainnya. Selain itu, integrasi data kualitatif berupa wawancara dengan manajemen, auditor, dan regulator dapat memperkaya pemahaman mengenai motivasi, tekanan institusional, dan proses pengambilan keputusan di balik praktik pelaporan keuangan. Penelitian lanjutan juga dapat menguji secara empiris bagaimana upaya pemulihan legitimasi pasca-skandal memengaruhi kualitas tata kelola dan kepercayaan investor dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, D., Muttaqin, G. P. A., & Megasyara, I. (2025). Determinan Audit Delay Pada Perusahaan Consumer Cyclical Sub Sektor Consumer Services Yang Terdaftar Di BEI Periode 2021-2023.

- Amrullah, A. H., Asyidqi, A. T., Suwandi, J., Alifa, A. R., Oktaviani, N. G., & Suryanti, N. (2024). Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Dalam Masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). *Bulletin Of Community Engagement*, 4(2), 41–48.
- Angelika, K. N. (2024). Analisis Perbandingan Kualitas Laporan Keuangan Antara Perusahaan Publik Dan Swasta. *Mandalika Law Journal*, 2(1), 22–28.
- Arum, E. D. P., Wijaya, R., Wahyudi, I., & Brilliant, A. B. (2023). *Corporate Governance And Financial Statement Fraud During The COVID-19: Study Of Companies Under Special Monitoring In Indonesia*.
- Boedihardjo, D. C., & Ardini, L. (2024). Analisis Pelanggaran Postulat Audit Dalam Kasus Audit Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tahun 2018. *BIP's JURNAL BISNIS PERSPEKTIF*, 16(1), 64–77.
- Chendra, S. V., Laetitia, E., Cahyasari, D., & Putri, K. A. (2025). Analisis Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Menggunakan Metode Horizontal Dan Vertikal Untuk Menilai Kinerja Keuangan. *Researchgate*.
- CNN Indonesia. (2019, April 30). *Kronologi Kisruh Laporan Keuangan Garuda Indonesia*.
- Fauziah, I. R. (2025, May 10). *Fraud Ditinjau Dari Etika Profesi Dan Etika Bisnis: Kasus PT Garuda Indonesia*.
- Gulo, W., & Setyawati, D. M. (2023, Mei). *Analysis Of Earnings Manipulation Shenanigans In The Financial Statements Of PT Garuda Indonesia TBK For The 2017-2021 | Formosa Journal Of Multidisciplinary Research*.
- Herdiansen, H., & Puspita, M. E. (2024). Dampak Implementasi Standar Akuntansi Terhadap Laporan Keuangan Perusahaan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(5), 1763–1775.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure*. *Journal Of Financial Economics*.
- Khikmah, L., & Purwanto, A. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Fairness Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 12(1).
- Malihah, L. (2024, September 20). *Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan IAI*.
- Maulida, M. (2025, January 6). *Belajar Dari Kasus PT Garuda Indonesia: Pentingnya Integritas Dan Transparansi Dalam Laporan Keuangan Halaman 1—Kompasiana.Com*.
- Natalis, C. (2023). *Pendeteksian Financial Shenanigans Pada Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk*.
- Pablo, S. (2019, June 29). *Kemenkeu, OJK & BEI Kompak Sanksi Garuda Karena Lapkeu 2018*.
- Pratama, E. F., Rizieq, A., & Oematan, D. J. (2025). Analisis Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi: Studi Kasus PT Garuda Indonesia Tbk. *Journal Social Society*, 5(1), 229–240.
- Pridehan, S., Maharani, V., Pane, E. N., & Tarina, D. D. Y. (2024a). Analisis Hukum Terhadap Kewajiban Laporan Keuangan Di Pasar Modal: Studi Kasus Manipulasi Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tahun 2018. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4).
- Resia, E. (2021, October 27). *Menyelamatkan Atau Mengubur Garuda Indonesia*.
- Rosidah, I., Gunardi, Kesumah, P., & Rizka, R. B. (2023). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi : EMBA*, 2(1), 137–156.
- Schilit, H. M., & Perler, J. (2010). *Financial Shenanigans: How To Detect Accounting Gimmicks & Fraud In Financial Reports, Third Edition*. McGraw Hill Professional.
- Sulistiowati, A. N. T., Anisa, S. T., Meilinda, A., & Misidawati, D. N. (2025). Transparansi Keuangan Daerah: Mengapa Etika Akuntansi Penting? *Journal Of Sharia Economics Scholar (Joses)*, 3(1).
- Susilo, B., & Wantono, E. H. (2016). *Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Good Corporate Governance (GCG) Code*. EDI Indonesia.
- Wahyudi, M. A., & Dewayanto, T. (2023). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Financial Statement Fraud (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019- 2021). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 12(3).